

**ANALISIS PEMANFAATAN WEBSITE JAKARTA.GO.ID DALAM
MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE DI DKI JAKARTA**

TAHUN 2021

Chissa Putri Raharningtyas

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Krisnadwipayana

e-Mail: chissa.raharningtyas@gmail.com

Abstract: Analysis of the Utilization of Official Website jakarta.go.id in Improving Good Governance in DKI Jakarta. The development of Information and Communication Technology (ICT) has a significant impact on human life. Recently, the term electronic-based government or known as e-Government, has emerged. One of the manifestations in the implementation of e-Government is the creation of a local government website. Therefore, this study aims to find out how the use of DKI Jakarta official website jakarta.go.id. This study used a qualitative method with a descriptive approach. This study used the principal of Good Governance theory. The results of the study show that the use of DKI Jakarta official website jakarta.go.id has been running quite well, jakarta.go.id website has been useful for the wider community. The supporting factors for the use of the jakarta.go.id website are technologies and resources, while the inhibiting factor for the use of jakarta.go.id website is coordination.

Keywords: technology, e-Government, website.

Abstrak: Analisis Pemanfaatan Website jakarta.go.id Dalam Meningkatkan Good Governance di DKI Jakarta. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Belakangan ini, muncul istilah pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan sebutan *e-Government*. Salah satu wujud dari penerapan *e-Government* adalah pembuatan website pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegunaan *website* resmi DKI Jakarta jakarta.go.id. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori prinsip-prinsip *good governance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *website* resmi DKI Jakarta jakarta.go.id sudah berjalan dengan cukup baik, *website* jakarta.go.id sudah bermanfaat bagi masyarakat luas. Faktor pendukung pada pemanfaatan *website* jakarta.go.id adalah teknologi dan sumber daya, sedangkan faktor penghambat pada pemanfaatan *website* jakarta.go.id adalah koordinasi.

Kata Kunci: teknologi, *e-Government*, *website*.

I. PENDAHULUAN

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Berbagai macam bidang dalam kehidupan manusia telah berubah, termasuk dalam bidang pemerintahan dan pelayanan. Selain pelayanan konvensional yang selama ini terkesan kaku dan berbelit-belit, belakangan ini juga muncul istilah pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan sebutan *e-Government* yang menjadi populer seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Secara umum, *e-Government* atau *electronic government* dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Meskipun menggunakan teknologi informasi yang ada, *e-Government* bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakatnya. Di dalam konsep *e-Government* masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, mengirim surat dan

berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah.

Dalam penelitian tentang Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan *e-Government* di Indonesia, hasil Klasifikasi Status Perkembangan *e-Government* Berdasarkan Provinsi berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa *e-Government* di DKI Jakarta belum sampai pada tahap 4 yaitu tahap pemanfaatan. Pada 7 pemerintah daerah, 1 pemerintah daerah ada pada tahap 1 yaitu persiapan, 5 pemerintah daerah ada pada tahap 2 yaitu pematangan dan 1 pemerintah daerah ada pada tahap 3 yaitu pemantapan. Hal ini bisa turut menjadi perhatian di mana DKI Jakarta memiliki peringkat pertama dalam Provinsi dengan *e-Government* terbaik namun dalam tahapan *e-Government* belum sampai tahap akhir yaitu tahap 4 pemanfaatan.

Selain itu, proses *Controlling* dan *Monitoring* dalam penerapan *e-Government* di DKI Jakarta juga belum maksimal. *Controlling* atau pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai

dengan apa yang telah direncanakan, sedangkan Monitoring adalah kegiatan mengumpulkan data dan pengukuran kemajuan atas program untuk memperoleh informasi secara terus-menerus sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. *Controlling* dan *Monitoring* dalam penerapan *e-Government* ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Salah satu wujud dari *penerapan e-Government* adalah pembuatan *website* pemerintah daerah. Untuk melaksanakan kesejahteraan bagi masyarakat, maka pemerintah daerah (dalam hal ini adalah PEMPROV DKI Jakarta) wajib menyediakan kebutuhan masyarakatnya, salah satu kebutuhan tersebut berupa informasi yang jelas dan transparan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan yang baik membutuhkan sebuah wadah, salah satunya adalah pembuatan *website*. Pembuatan *website* tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi seperti

layanan, berita, kegiatan, pengaduan, bencana, cuaca, menyampaikan aspirasi, berinteraksi dengan pemerintahnya dan lain-lain.

Dengan adanya *website* tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat mendapat banyak keuntungan dan juga membantu hambatan dalam penyampaian informasi. Belakangan ini, *website* menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling populer, maka dari itu sudah sepantasnya dilakukan pengelolaan *website* yang baik dan benar. Sebuah *website* mampu menyediakan deskripsi yang lebih lengkap tentang layanan, kegiatan, berita maupun potensi perihal organisasi/lembaga yang bersangkutan, termasuk di PEMPROV DKI Jakarta. Dengan adanya fasilitas yang lebih lengkap tersebut dapat memungkinkan untuk menawarkan layanan real time, pencarian informasi dapat dilakukan lebih cepat dan adanya kemudahan penawaran jasa. Opsi-opsi tersebut tidak tersedia pada layanan *offline* di mana orang tidak menggunakan *website*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kegunaan Website

Terdapat 3 (tiga) kriteria kegunaan website, yaitu:

1. *Accessibility*: kriteria ini berkaitan dengan ketersediaan dan kemudahan user website dalam mengakses konten-konten dari sebuah website.

2. *Easy of Use*: kriteria ini berkaitan dengan cara yang dilakukan untuk menggunakan situs web atau seberapa mudah website tersebut dapat digunakan.

3. *Customization and Personalization*: kriteria ini berkaitan dengan suatu website yang menyediakan konten-konten atau isi yang dinamis.

B. Good Governance

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *good governance* sebagai sebuah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*. Dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut LAN, kata “*Good*” dalam *good governance* mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat

meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) pembangunan berkelanjutan, kemandirian, dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek *funcional* dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut LAN, wujud *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara yang kukuh dan bertanggung jawab juga efisien dan efektif.

Prinsip-Prinsip *Good Governance* menurut UNDP (1997) yaitu: Partisipasi Masyarakat, *Rule of Law*, Transparansi, Daya Tanggap (*Responsiveness*), Konsensus, Kesetaraan (Gender), Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Strategi.

Prinsip-Prinsip *Good Governance* menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2007) yaitu: *Rule of Law*, Transparansi, Daya Tanggap (*Responsiveness*), Profesional, Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi.

C. e-Government

e-Government atau *electronic government* dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Meskipun

menggunakan teknologi informasi yang ada, *e-Government* bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakatnya. Menurut MENKOMINFO mendefinisikan *e-Government* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memajukan dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, runtun dan adil.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government menjelaskan bahwa pengembangan *e-Government* dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap (1) persiapan, (2) pematangan, (3) pematapan dan (4) pemanfaatan.

Di Indonesia, secara umum implementasi *e-Government* berada di tahap kedua yaitu pematapan. Pada tahap pematapan, dibuat *website* pemerintah daerah yang informatif dan interaktif, selain itu juga dibuat antarmuka keterhubungan antara lembaga.

Pengembangan *electronic government* atau pemerintahan elektronik adalah upaya memajukan penyelenggaraan pemerintahan berbasis *electronic* dalam rangka untuk meningkatkan kualitas

pelayanan *public* secara efisien dan efektif. Melalui pengembangan *electronic government*, dilaksanakan penataan *management system* dan proses kerja di lingkup pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan *technology* dan informasi.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar belakang alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang yang tertarik secara alamiah

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang menjadi pengelola website resmi PEMPROV DKI Jakarta (jakarta.go.id). Lokasi penelitian beralamat di Jl. Merdeka Selatan 8-9 Blok B Lt. 3 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia.

C. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti harus dapat menguasai wawasan dan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Peneliti kualitatif

sebagai *human instrument* berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data terkait penelitian, melakukan pengumpulan data, analisis data dan membuat kesimpulan atas temuannya itu sendiri.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data adalah observasi secara langsung, wawancara kepada informan terkait dan dokumentasi.

Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif berarti memberikan gambaran secara akurat data yang diperoleh dari sumber-sumber untuk mencapai tujuan penelitian.

IV. PEMBAHASAN

A. Rule of Law

Produk hukum DKI Jakarta secara langsung tidak tertera pada web jakarta.go.id namun disediakan link untuk ke *website* khusus yaitu jdih.jakarta.go.id yang merupakan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Situs tersebut menampilkan berbagai dokumen hukum yang dapat diakses secara mudah dan gratis oleh masyarakat.

Beberapa dokumen hukum yang dapat diakses di antaranya adalah produk hukum pemerintah pusat yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri, hingga produk hukum daerah.

Pengunjung *website* dapat mencari, mengakses, serta mengunduh Surat Edaran, Keputusan Gubernur, dan produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta lainnya. Untuk mempermudah pencarian, fitur ini mengizinkan pengunjung *website* untuk mencari produk hukum sesuai Nomor, Tahun, Tentang, dan Kategori. Beberapa kategori yang dapat dicari di antaranya Pemerintahan, Pertanahan, Izin Mendirikan Bangunan, Kesehatan, Pendidikan, Perhubungan, Sosial, dan sebagainya.

B. Transparansi

Web jakarta.go.id mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. Pada prinsipnya transparansi adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus melibatkan masyarakat dalam menjalankan fungsi controlling terhadap segala upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut masyarakat *website* jakarta.go.id sudah cukup terbuka meskipun tidak semua bagian dapat diperoleh, kemungkinan hal tersebut disebabkan karena belum lengkapnya pendataan dikarenakan *website* tersebut baru diluncurkan bulan Juli 2021 lalu.

Banyaknya informasi yang dikeluarkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dapat dilihat pada menu “Informasi Publik” Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta jakarta.go.id yaitu PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Open Data Jakarta, Berita Jakarta, Siaran Pers, Media Jaya, Infografik dan Ensiklopedia. Aktualitas informasi yang ada pada web jakarta.go.id sudah cukup baik.

Selain itu, pada menu “Mengenal Jakarta”, transparansi publik lainnya dapat dilihat pada Rencana Pembangunan, Laporan dan Anggaran. “Rencana Pembangunan” yang tertera pada web terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM). Informasi “Laporan” yang tertera pada web meliputi Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Informasi “Anggaran” berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

C. Daya Tanggap (Responsiveness)

Daya tanggap yaitu kemampuan *government* untuk mengenali kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda *priority*, dan mengembangkannya ke dalam program-program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Responsivitas dapat diukur dari sejauh mana kesigapan pemerintah memberikan tanggapan yang cepat atas keluhan dan kebutuhan masyarakat.

Daya tanggap Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika DKI Jakarta pada pengelolaan web jakarta.go.id sudah cukup baik.

D. Partisipasi

Layanan yang ada pada web jakarta.go.id sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat. Pendapat dan masukan dari masyarakat ditampung di 14 kanal pengaduan yang tertera pada *website*. Dari 14 kanal tersebut, bisa ada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses langsung orang yang berkepentingan

melalui *website*. Dari 14 kanal yang tertera pada *website*, bisa ada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat juga aktif memberikan masukan tentang kebijakan yang ada di Jakarta.

E. Akuntabilitas

Dalam melihat akuntabilitas pada *website* pemerintah daerah yaitu menyajikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), laporan Dana Hibah dan Bansos, penyajian laporan keuangan tepat waktu dan adanya pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Akuntabilitas pada *website* jakarta.go.id dapat dilihat pada menu “Mengenal Jakarta”, di mana pada menu tersebut tertera Rencana Pembangunan, Laporan dan Anggaran. “Rencana Pembangunan” yang tertera pada web terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM). Informasi “Laporan” yang tertera pada web meliputi Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Informasi “Anggaran” berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertera pada *website* jakarta.go.id, sedangkan informasi tentang dana hibah dan bansos DKI Jakarta tidak tertera pada *website* jakarta.go.id. Selain itu, penyajian laporan keuangan pada *website* jakarta.go.id sudah tepat waktu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2010-2020 dapat diunduh dalam bentuk *file* PDF.

Dengan adanya akuntabilitas tersebut, maka proses *good governance* di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika DKI Jakarta harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Akuntabilitas yang baik akan bermuara kepada pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi prasyarat untuk terwujudnya pemerintahan yang baik atau *good governance*. Dengan demikian pertanggung jawaban merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah, di mana aparatur pemerintah harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya.

F. Efektifitas dan Efisiensi

Suatu efektifitas pada *website* pemerintah daerah yaitu apabila suatu *website* tersebut menunjukkan keberhasilan dalam memberikan

pelayanan publik kepada masyarakat. Pada efektifitas sebuah *website* pemerintah daerah tersebut, ada dua indikator yang menjadi dasar dalam pembuatan *website* pemerintah daerah yaitu interaktivitas dan sistem navigasi. Yang menjadi kategori interaktivitas yaitu e-mail, alamat *website* dan nomor telepon.

Pada *footer website* jakarta.go.id, tertera lengkap e-mail dki@jakarta.go.id nomor telepon beserta faks (+6221) 382 2255 dan juga alamat pengelola website yang semuanya dapat dihubungi oleh masyarakat terkait keluhan yang ada dan juga pelayanan.

Pada indikator sistem navigasi, yang menjadi kategori yaitu sistem pencarian, akun resmi media sosial pemerintah daerah dan statistik pengunjung. Pada *website* jakarta.go.id, sistem pencarian dapat dilakukan dengan baik, tombol *search bar* tertera di bagian atas *website*. Akun resmi media sosial pemerintah daerah juga tertera pada halaman utama, yaitu twitter PEMPROV DKI Jakarta @DKIJakarta. Namun, pada *website* jakarta.go.id tidak ada statistik pengunjung.

Ketersediaan teknologi internet dapat memberikan efisiensi dalam penyampaian informasi kepada

masyarakat. Dalam *website* Pemerintah Kota DKI Jakarta, disediakan link-link untuk ke SKPD maupun lembaga pemerintah lain di seputar kota DKI Jakarta, misalnya Jakarta Smart City, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), Jakarta Open Data dan Berita Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hal ini merupakan bentuk efisiensi yang disediakan dalam website untuk mempermudah pengunjung mendapatkan secara detail informasi yang diinginkan.

Data yang ada pada *website* jakarta.go.id bukan hanya dari 1 dinas saja, tetapi dari banyak dinas. Informasi yang terdapat di *website* seperti berita, anggaran, pendidikan dan kesehatan didapat dari pengelola *website* jakarta.go.id dari dinas masing-masing. Dengan banyaknya dinas yang ada, tentu dinas-dinas tersebut memiliki kesibukan masing-masing, di situ terdapat tantangan untuk mendapatkan *update* atau data yang akan dimasukkan ke *website* jakarta.go.id. atau membuat konten terbaru pada *website* jakarta.go.id, diperlukan koordinasi ke dinas terkait.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemanfaatan website resmi jakarta.go.id sudah berjalan dengan cukup baik. Website resmi jakarta.go.id sudah bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Faktor hambatan internal pada pemanfaatan website jakarta.go.id adalah masalah koordinasi, karena dibutuhkan proses yang cukup lama untuk koordinasi. Data pada *website* jakarta.go.id bukan hanya dari 1 dinas saja, tetapi dari banyak dinas. Informasi yang terdapat di *website* seperti berita, anggaran, pendidikan dan kesehatan didapat dari pengelola *website* jakarta.go.id dari dinas masing-masing. Dengan banyaknya dinas yang ada, tentu dinas-dinas tersebut memiliki kesibukan masing-masing, di situ terdapat tantangan untuk mendapatkan update atau data yang akan dimasukkan ke website jakarta.go.id. atau membuat konten terbaru pada website jakarta.go.id, diperlukan koordinasi ke dinas terkait. Konten yang telah dibuat lalu harus konfirmasi ke dinas terkait, kalau sudah sesuai akan ditayangkan, kalau belum sesuai harus direvisi terlebih dahulu.

B. Saran

Meskipun sudah memiliki pengunjung yang cukup banyak, masih perlu dilakukan sosialisasi terkait

adanya website resmi PEMPROV DKI Jakarta jakarta.go.id agar masyarakat luas mendapatkan informasi yang lebih akurat, karena masih banyak masyarakat yang percaya dengan hoaks.

Mengingat potensi website dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi lebih luas lagi serta melibatkan masyarakat (publik, pebisnis, dan intra-pemerintah) sebagai pengguna akhir dalam proses pengembangan website pemerintah daerah agar kontennya juga dapat sinkron dengan kebutuhan informasi dan layanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Benius. 2018. *Panduan Penulisan Skripsi*. Palangkaraya: FISIP Univ. Palangkaraya.

Indarjit, Eko. 2006. *Electronic Government: Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Jogjakarta: Andi.

Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Savitri, Astrid. 2009. *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Jogjakarta: Penerbit Genesis.

DOKUMEN:

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

JURNAL:

Amfahtori Wijarnoko, Muhammad. 2020. *PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI DKI JAKARTA (STUDI PORTAL RESMI PROVINSI DKI JAKARTA)*. Vol. 12 No. 1, hal. 22

Harminingtyas, Rudika. 2014. *Analisis Layanan Website Sebagai Media Promosi, Media Transaksi dan Media Informasi dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image Perusahaan Pada Hotel Ciputra di Kota Semarang*. Vol. 6, No. 3, hal. 42.

Hayati & Priyo Purnomo, Eko. 2018. *Implementasi e-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Vol. 15, No. 3, hal. 8.

Sari, Kusuma Dewi Arum. 2012. *IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT SYSTEM DALAM UPAYA PENINGKATAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA*. Vol. XI No. 1, hal. 2.

Setiawan, Edwi Arief. 2008. *Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Indonesia: Perspektif Content dan Manajemen*. Vol. X No. 7, hal. 91.

Yunita, Novi Prisma & Aprianto, Rudi Dwi. 2018. *Kondisi Terkini Pelaksanaan e-Government di Indonesia: Analisis Website*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* hal. 335.

INTERNET:

<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/inpres/inpres-no3-tahun-2003-tentang-kebijakan-dan-strategi-nasional-pengembangan-e-governmet/> diakses pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 23:57 WIB

<https://ppid.jakarta.go.id/visi-misi> diakses pada tanggal 22 November 2020 pukul 16:19 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/03/jakarta-provinsi-dengan-e-government-terbaik> diakses pada tanggal 19 November 2020 pukul 16:14 WIB

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/> diakses pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 23:20 WIB

https://kominfo.go.id/content/detail/23483/peran-penting-iot-untuk-industri-dan-pemerintah-indonesia/0/sorotan_media diakses pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 00:17 WIB

www.jakarta.bps.go.id diakses pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 16:47 WIB

jakarta.smartcity.go.id diakses pada tanggal
4 Agustus 2021 pukul 23:04 WIB

databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/1/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta diakses pada
tanggal 10 Agustus 2021 pukul 13:08 WIB